

LAPORAN KEGIATAN

**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2017**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LPPD Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2018 yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga berbagai saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaannya di kemudianhari.

Demikian untuk maklum dan semoga Allah SubhanahuwaTa'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua, Amin

Kepala,
Dinas PP-PA Kota Bima

Drs. M. NUR H. AMAJID, MH
NIP.19650213 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. TUJUAN	3
1.3. SASARAN	4
1.4. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN	
2.1. WAKTU PELAKSANAAN	5
2.2. STRATEGI PELAKSANAAN	5
BAB III HASIL KEGIATAN	
3.1. HASIL YANG DICAPAI.....	6
3.2. KENDALA YANG DIHADAPI	6
3.3. TINDAK LANJUT KEGIATAN	6
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	7
4.2. SARAN	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (2), menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat menegaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak selama satu tahun.
2. Mengetahui pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi 1) tataran pengambil kebijakan, 2) tataran pelaksana kebijakan, dan 3) tingkat pencapaian Standar Minimal Pelayanan.
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bima tahun 2017 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

4. Mengetahui arah Pelaksanaan Kebijakan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terhadap Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bima maupun Pemerintah Propinsi serta Kebijakan Pemerintah Pusat.

1.3. SASARAN

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2017 ini ditujukan bagi para pemangku pengambil kebijakan baik Kepala Daerah maupun yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Mengetahui pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan ukuran kinerja Pemerintahan terhadap realisasi tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh daerah.

1.4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dari Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2017 ini diharapkan:

1. Terlaksanannya Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi 1) tataran pengambil kebijakan, 2) tataran pelaksana kebijakan, dan 3) tingkat pencapaian Standar Minimal Pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
2. Memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bima tahun 2017 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintah Daerah, Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bima khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima dilakukan Oleh Tim Penyusun yang di dibentuk melalui Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dimana Tim Tersebut diKetuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, yang bertugas sebagai 1) menghimpun Data dari bidang teknis SKPD, 2) Mengolah dan memilah Data dari bidang teknis SKPD 3) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga (3) bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017.

Tim Penyusun memulai Pekerjaan Verifikasi yang dilanjutkan dengan Penginputan dan Pengolahan data yang bersumber dari bidang teknis SKPD di mulai awal bulan Januari dengan waktu 10 hari, dengan waktu tersebut Tim Penyusun mampu menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekitar 30% Selanjutnya memasuki tahap validasi data, Dimana data tersebut masih harus divalidasi melalui asses dengan bidang teknis SKPD sehingga data yang ditampilkan menjadi data yang Valid.

2.2. STRATEGI PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua (2) metode yaitu Pola menunggu data dan pola menjemput data, untuk bulan januari Tim Penyusun masih menunggu data yang diberikan oleh bidang teknis SKPD dimana data tersebut langsung divalidasi oleh Tim Penyusun apabila masih kurang Tim penyusun meminta bidang teknis SKPD untuk melengkapi data yang diminta dengan menunjukan data pendukung.

BAB III HASIL KEGIATAN

3.1. HASIL YANG DICAPAI

Secara Umum, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017 merupakan Laporan pertanggung jawaban dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Terlaksananya Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan, dan tingkat pencapaian Standar Minimal Pelayanan.
3. Naiknya peringkat dan Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara Nasional.

3.2. KENDALA YANG DIHADAPI

Kendala yang dihadapi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih banyak Bidang teknis SKPD yang belum secara tepat menyampaikan data yang diminta oleh Tim Penyusun.
2. Masih kurangnya pengetahuan tatacara pengisian Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan benar.

3.3. TINDAK LANJUT KEGIATAN

Tindak lanjut dari kegiatan ini dengan melakukan rapat teknis Dinas cara pengisian data sehingga masing-masing bidang teknis mampu menyampaikan data yang benar dan valid yang bisa dipertanggungjawabkan, Selain itu perlu peningkatan Anggaran melalui APBD Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 dimana kegiatan rapat Teknis tersebut dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Data yang baik, benar dan Valid yang di buat oleh masing-masing bidang teknis sehingga Tim Penyusun dalam penyusunan Laporan tersebut dapat selesai pada waktunya.

4.2. SARAN

Dalam mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan yang baik dan transparan, maka perlu diambil langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Ketersediaan Data yang baik, benar dan Valid yang di buat oleh masing-masing bidang teknis SKPD sehingga Tim Penyusun dalam penyusunan Laporan tersebut dengan hasil yang memuaskan.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan bagian pemerintahan pada sekretariat daerah Kota Bima.

Kota Bima, Januari 2018

Kepala,
Dinas PP-PA Kota Bima

Drs. M. NUR H. AMAJID, MH
NIP.19650213 199203 1 011

**FORMAT KEBUTUHAN DATA URUSAN DESENTRALISASI
(WAJIB DAN PILIHAN)**

**URUSAN PEMERINTAH : URUSAN WAJIB PEMEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SKPD : DINAS PEMEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Uraian Program Kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan SKPD.

NO.	URUSAN YANG DILAKSANAKAN		PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	389,433,750	382,867,771
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	26,430,000	26,430,000
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6,279,000	5,302,500
		3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasionan(Jasa Non pegawai, Jasa STNK dan BPKB)	14,800,000	12,293,500
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41,040,000	41,040,000
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,962,000	21,962,000
		6	Penyediaan alat tulis kantor	27,988,500	27,987,750
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,170,000	38,161,750
		8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,300,000	2,300,000
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,400,000	3,590,000
		10	Penyediaan makanan dan minuman	14,350,000	13,845,000
		11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	175,410,500	174,655,271
		12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	15,303,750	15,300,000
		B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	123,561,000	95,376,000
		1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47,298,000	47,298,000
		2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67,913,000	39,728,000
		3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,350,000	8,350,000

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN		PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		C.	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	10,500,000	10,500,000
		2	Pengadaan PakaianDinas beserta Perlengkapannya	10,500,000	10,500,000
		D.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	94,376,750	94,033,750
		1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kenarja SKPD	20,613,500	20,579,500
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	9,600,000	9,600,000
		3	Penyusunan Pelaporan Relaisasi Anggaran Triwulan	17,589,000	17,280,000
		4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,916,000	9,916,000
		5	Penyusunan Renstra,Rencana Kerja RKA/DPA /DPPA SKPD	36,658,250	36,658,250
		E.	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	158,082,000	130,965,000
		1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkaitan dengan kesetaraann gender PP dan perlindungan anak	5,851,000	5,851,000
		2	Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak	152,231,000	125,114,000
		F.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	257,374,500	252,816,200
		1	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	5,730,000	5,730,000
		2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.	24,107,500	23,159,500
		3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	108,628,000	108,328,000
		4	Evaluasi Pelaksanaan PUG	18,030,500	17,360,500
		5	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	26,966,000	26,766,000
		6	Pengembangan kota sebagai Kota Layak Anak	73,912,500	71,472,200

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN		PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		G.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	109,965,500	79,904,000
		1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah	20,353,000	18,554,000
		2	Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan	17,607,500	17,595,000
		3	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	31,470,000	31,470,000
		4	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	10,110,000	9,835,000
		5	Pembinaan dan Lomba kecamatan sayang ibu (KSI) dan rumah sakit sayang ibu (RSSI)	30,425,000	2,450,000
		H.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	42,783,000	42,783,000
		1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	42,783,000	42,783,000
JUMLAH				1,186,076,500	1,089,245,721

Raba-Bima, 22 Januari 2018
Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.
Nip. 19650213 199203 1 011

2 Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian Program dan kegiatan Uraian Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi Kewenangan SKPD

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN	TARGET	RALISASI TARGET	
1		2		3	5	6	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			
				Materai 6.000 (360 bh)	12 Bulan	360 bh	
				Materai 3.000 (240 bh)	12 Bulan	240 bh	
					Jasa Non Pegawai (3 Orang)	12 Bulan	3 Orang
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jasa Kawat Faximile	12	bulan
					- Jasa TV Kabel	12	bulan
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasionan(Jasa Non pegawai, Jasa STNK dan BPKB)	- Jasa Non Pegawai	12 Bulan	12 Bulan
					- Kendaraan Roda dua	10 Unit	10 Unit
					- Kendaraan Roda Empat Mobil Operasional (EA. 30 S)	1 Unit	1 Unit
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 orang	12 bulan	12 bulan
					- Bendhar.Pengeluaran 1 orang	12 bulan	12 bulan
					- Bendahara Pembantu Pengelu. (Gaji) 1 orang	12 bulan	12 bulan
					- Bendahara. Pengurus Barang 1 orang	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sapu Lidi	8 bh	8 bh
					Sapu Lantai	8 bh	8 bh
					Kain Pel Lantai	8 br	8 br
					Bak Sampah Plastik	8 bh	8 bh
					Kain Lap	8 lbr	8 lbr
					Pembersih Kaca	5 botol	5 botol
					Cairan Pembersih Lantai	5 botol	5 botol
					Cairan Pembersih WC	5 botol	5 botol
					Pengharum Ruangan (parfum)	5 botol	5 botol
					Alat Pel	3 bh	3 bh
		Sikat Lantai Biasa	5bh		5bh		
		Sikat Kloset	5 bh		5 bh		
		Keset	5 bh		5 bh		
		Taplak Meja	2 lbr		2 lbr		
		Kantung Plastik sampah	2 pak		2 pak		
		Bulu Ayam	5 bh		5 bh		
		Slang Plastik	10 meter	10 meter			
		Gunting Rumput	2 bh	2 bh			
		Kran Air	5 bh	5 bh			
		Retrebusi Kebrsihan' (Jasa Perawatan hal.Ktr.) 1 orang	12 Bulan	12 Bulan			
		Pnjaga Malam (Tenaga (Cleaning servise) (S1) 1 orang	12 Bulan	12 Bulan			

			Penyediaan alat tulis kantor	Bahan pakai habis	12 Bulan	12 Bulan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Spanduk	5 bh	5 bh
				Baliho	3 bh	3 bh
				Umbul-umbul Biasa	10 lbr	10 lbr
				Bendera Merah Putih	2 lbr	2 lbr
				Cetak Undangan besar (Hari Besar Nasional)	50 lbr	50 lbr
				Cetak Undangan Kecil	50 lbr	50 lbr
				Cetak Piagam (Sertifikat)	30 lbr	30 lbr
				Cetak Makalah dan cetak Materi Kegiatan	50 lbr	50 lbr
				Blangko Kwitansi	24 blok	24 blok
				Blangko Faktur	24 blok	24 blok
				Blangko Faktur Pajak (SSP)	12 blok	12 blok
				Foto Copy Dokumen	30.000 lbr	30.000 lbr
				Penjidan Dokumen	120 jilid	120 jilid
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Bola Lampu Listrik (Lampu pijar,dan Neon)	10 Buah	10 Buah
				- Fiting Lampu	10 Buah	10 Buah
				- Saklar Lampu	5 Buah	5 Buah
				- Stop Kontak	5 Buah	5 Buah
				- Cok Listrik ganda	5 Buah	5 Buah
				- Kabel Gulungan	1 Rol	1 Rol
				- Lampu Hias /Kelap kelip	1 Rol	1 Rol
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Majalah surat Kabar	12 bulan	12 bulan
			Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum Harian pegawai 1 Kali Snack 4 Kali	34 Orang	34 Orang
				Makan dan minum Hari-hari besar Nasional 1 Kali snack x 1 kali Makan	350 Orang	350 Orang
				Makan dan minum rapat koordinasi bulanan pegawai I Kali Snack	40 Orang	40 Orang
				Makan dan Minum Tamu pusat dan provinsi (1 x makan x 1 Kali Snack)		
				Makan dan minum Tamu 1 Kali Snack	50 Oarng	50 Oarng
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	koordinasi dengan lintas sektor dinas dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	koordinasi dengan lintas sektor dinas Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Personal Computer	1 Unit	1 Unit
				Pengadaan Laptop	2 Unit	2 Unit
				Pengadaan Printer	2 Unit	2 Unit

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Servise		
				Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	10 Unit	10 Unit
				Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit
				Suku Cadang		
				Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	10 Unit	10 Unit
				Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit
				Bahan Bakar Permium dan Solar		
				Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	10 Unit	10 Unit
				Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit
				Bahan Pelumas OLI		
				Kendaraan Roda 2	10 Unit	10 Unit
				Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Laptop	2 Unit	2 Unit
				Printer	3 Unit	3 Unit
				Sound sistim mobil	1 Unit	1 Unit
				Mesin ketik	1 Unit	1 Unit
				Mouse	5 Unit	5 Unit
				Stavol	3 Unit	3 Unit
				harddiskh	1 Unit	1 Unit
				Bateri Cast	2 Unit	2 Unit
			Program Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur			
			Pengadaan PakaianDinas beserta Perlengkapanya	Belanja Pakaian Keki	16 Potong	16 Potong
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			
			Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kenarja SKPD	Renstra	1 dokumen	1 dokumen
				renja	1 dokumen	1 dokumen
			Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Laporan Keuangan Semester	1 Laporan	1 Laporan
			Penyusunan Pelaporan Relaisasi Anggaran Triwulan	Pelaporan Relaisasi Anggaran Triwulan	4 Laporan	4 Laporan
			Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan
			Penyusunan RKA/DPA /DPPA SKPD	RKA/DPA /DPPA SKPD	3 dokumen	3 dokumen

		Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan				
			Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraann gender PP dan perlindungan anak	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	40 Orang	40 Orang
			Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Perda PP, Perwali PP dan Perda PA, Perwali PA	1 Perda PP, Perwali PP dan 1 Perda PA, Perwali PA	1 Perda PP, Perwali PP dan 1 Perda PA, Perwali PA
1		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				
			Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	40 Organisasi Perempuan	40 Organisasi Perempuan
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.	Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan se-Kota Bima	30 Kelompok	30 Kelompok
			Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kelompok perempuan (majelis Taklim) yang mendapatkan bantuan yang berupa sarung dan sarung	900 Lembar	900 Lembar
			Evaluasi Pelaksanaan PUG	Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	18 SKPD di Kota Bima	18 SKPD di Kota Bima
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	data KDRT ke dalam kasus kekerasan Anak	5 Kecamatan	5 Kecamatan
			Pengembangan kota sebagai Kota Layak Anak	Jumlah capaian 31 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, Data Bases terpilah KLA, profil anak pada masing-masing gugus Tugas, Pemahaman dan pengetahuan anak tentang kelangsungan hidup anak serta partisipasi anak dalam KLA	5 Kecamatan	5 Kecamatan
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah	sosialisasi Hak Tumbuh Kembang Anak (TKA)	25 Orang	25 Orang
			Panenyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistem perlindungan anak pada 5 Kec.	34 Oran Pelatih (TOT)	34 Oran Pelatih (TOT)
			Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	laporan terhadap sistem Catpor kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online.	2 Semester	2 Semester
2			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	38 Kasus	38 Kasus

		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terbinanya Organisasi Perempuan dan Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Bima	40 Orang Organisasi Perempuan yang dibina	40 Orang Organisasi Perempuan yang dibina
--	--	--	---	---	---	---

Raba-Bima, 22 Januari 2018
Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.
Nip. 19650213 199203 1 011

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR								GOLONGAN/PANGKAT				PENDIKN, PELATIHAN STRUKTURAL					JMLH	
			ISI	KOSONG	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	SPAMA		
	DINAS PP DAN PA KOTA BIMA	Jabatan Struktural dan Staf terdiri dari :																					
		Kepala Dinas PP dan PA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-		Pembina Utama Muda/IVc	-	V	-	-	-	1
		Sekretaris	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-		Pembina TK.I/lvb	-	-	V	-	-	1
		Kabid. PP dan Gender	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-		Pembina/IVa	-	-	-	-	Adum	1
		Kabid. Perlindungan Hak Peremp. dan Perlindungan khusus Anak	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-		Pembina/IVa	-	-	-	-	-	1
		Kabid. Pemenuhan Hak Anak	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-		Pembina/IVa	-	-	-	-	-	1
		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	V	-	1
		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Peremp. dan Gender Bidang Ekonomi	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-		Pembina/IVa	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Perem. Dan Gend. Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informa	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Perlindungan Perempuan	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Perindu. Khusus Anak	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	V	-	1
		Kasi. Data Kekerasan Perem.dan Anak	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	-	Adum	1
		Kasi. Hak Pendidikan dan Budaya	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Hak Sipil, Infor.dan Partisipasi	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-		Pembina TK.I/lvb	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Kes. Dasar dan Kesejahteraan	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/d		-	-	-	-	-	-	1
		Kasi. Perem. Dan Gend. Bidang Sosial Politik dan Hukum	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/c		-	-	-	-	-	Adum	1
		Staf	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/b		-	-	-	-	-	-	1
		Staf	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/b		-	-	-	-	-	-	1
		Staf	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/a		-	-	-	-	-	-	1
		Staf	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	Penata TK.I.III/a		-	-	-	-	-	-	1
		Staf	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-	II/a	-		-	-	-	-	-	-	1	
		Staf	V	-	-	V	-	-	-	-	-	Juru I/c	-	-		-	-	-	-	-	-	1	
		JUMLAH	23			1	2				1	18	1									22	

Raba-Bima, 22 Januari 2018
Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH
Nip. 19650213 199203 1 011

4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017 DAN REALISASINYA DALAM MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

NO	URUSAN WAJIB / PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA			PROSEN TASE (%)	NAMA SKPD PELAKSANA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,870,564,956.48	228,008,000	910,770,500	47,298,000	1,186,076,500	3,056,641,456.48	1,785,550,971.00	1,089,245,721.00	2,874,796,692	94.05%	Dinas PP dan PA Kota Bima

2,874,796,692

Raba-Bima, 22 Januari 2018
 Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH
 Nip. 19650213 199203 1 011

5 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam menjalankan penyelenggaraan atau pemerintah yang menjadi kewenangan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Lengkap	Kurang	Mencukupi
I	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Kendaraan Roda Empat	2 Unit	v	-	v
2	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	11 Unit	v	Masih Kurang	-
3	Meja Biro	5 Buah	v	-	v
4	Meja 1/2 Biro	27 Buah	v	-	v
5	Kursi Putar besar	6 Buah	v	-	v
6	Kursi besi	8 Buah	v	-	v
7	Laptop	10 Buah	v	-	v
8	Komputer	7 Buah	v	Masih Kurang	-
9	Kursi Kayu	16 Buah	v	-	v
10	Kursi Plastik	16 Buah	v	-	v
11	Filleng Kabinet	12 Buah	v	Masih Kurang	-
12	Mesin Ketik	1 Buah	v	-	v
13	Papan Kegiatan	3 Buah	v	-	v
14	Telepon	1 Unit	v	-	v
15	Printer	8 Unit	v	Masih Kurang	-
16	AC	5 Unit	v	-	v

6 Permasalahan Dan Solusi

NO	Permasalahan	Solusi
1	Kuantitas Sumber Daya Manusia Kurang Optimal	Dapat dilakukan melalui DIKLAT
2	Fasilitas kendaraan Dinas roda dua tidak mencukupi dengan jumlah Pejabat dan pegawai yang ada	Perlu pengadaan kendaraan Dinas roda dua Tahun 2018

7 Hal - Hal Lain

—————> Tidak ada

Raba-Bima, 22 Januari 2018
Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH
Nip. 19650213 199203 1 011

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : BIMA
NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN DATA	ELEMEN DATA DALAM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Program nasional (RKP)	Program Program	2 2	Foto Copy dari DPA yang menunjukkan program Nasional yang dilaksanakan SKPD	BAPPEDA
2	Keberadaan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah SOP SOP	Dokumen Dokumen	ada 6	Foto Copy Halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan prosedur dan halaman yang menunjukkan di tanda tangannya SOP	DPP dan PA
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda PP dan PA	2 2	Foto Copy Halaman muka (cover) halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan di tanda tangannya perda pelaksanaan dari permen tersebut Daftar rincian yang menunjukkan PERMEN yang di terbitkan kementerian teknis yang mengatur urusan yang di tangani	DPP dan PA DPP dan PA
4	Sstruktur Jabatan dan Eselonenering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan Jabatan	16 16	Daftar rincian jabatan Eselonenering yang terisi daftar susunan struktur organisasi dari SKPD	DPP dan PA DPP dan PA
5	Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan fungsional	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait	-
6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD Jumlah PNS Kota	Orang Orang	22 Personil 3.976 Personil	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Kota	DPP dan PA DPP dan PA

NO.IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN DATA	ELEMEN DATA DALAM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim	Orang	9	Daftar rincian jumlah Pejabat yang sudah ikut diklatpim	DPP dan PA
		Jumlah Pejabat SKPD yang ada	Orang	16	Daftar rincian jumlah Pejabat SKPD	DPP dan PA
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	Orang	16	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah Pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	DPP dan PA
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	Orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah Pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	DPP dan PA
9	Ada atau tidak adanya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	Dokumen			
	- RENSTRA SKPD	- RENSTRA SKPD	Ada	- 1 Dokumen	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani renstra	DPP dan PA
	- RENJA SKPD	- RENJA SKPD	Ada	- 1 Dokumen	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani Renja	DPP dan PA
	- RKA,	- RKA	Ada	Masing-masing 1 Dok.	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani RKA	DPP dan PA
10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	Jumlah program RKPd yang tidak diakomodir dalam Renja SKPD	Program	3	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait	
		Jumlah program Renja SKPD	Program	8	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait	DPP dan PA
11	Jumlah Program Renja RKPd yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program Renja RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Program	8	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada dalam renja yang dikomodir dalam RKA	DPP dan PA
		Jumlah program dalam RKA SKPD	Program	8	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada dalam renja yang diakomodir dalam RKA	DPP dan PA
12	Jumlah Program RKA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA yang diakomodir dalam DPA SKPD	Program	8	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan di akomodir dalam DPA	DPP dan PA
		Jumlah program dalam DPA SKPD	Program	8	Foto Cpy halaman muka (cover) halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	DPP dan PA

NO.IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN DATA	ELEMEN DATA DALAM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Total Anggaran SKPD	Rp	3,056,641,456.48	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
		Total Anggaran belanja APBD	Rp	847,542,132,301.60	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
14	Belanja Modal terhadap total belanja APBD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp	44,400,000	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
		Realisasi belanja. SKPD	Rp	2,874,796,692	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	43,321,500.00	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
		Realisasi belanja barang Jasa SKPD	Rp	1,044,845,721	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Bel Pemel,SKPD	Rp	43,321,500.00	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
		Realisasi belanja SKPD	Rp	2,874,796,692	Foto Copy Laporan keuangan SKPD	DPP dan PA
17	Keberadaan Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA.Calk.)	Jumlah Komponen Laporan Keuangan	Komponen	3 Komponen		
		- Neraca	Ada	Ada	Foto Copy halaman muka dan halaman yang menunjukkan Neraca SKPD	DPP dan PA
		- LRA	Ada	Ada	Foto Copy halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA SKPD	DPP dan PA
		- CALK	Ada	Ada	Foto Copy halaman muka dan halaman yang menunjukkan CALK SKPD	DPP dan PA
18	Adanya Inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada Laporan Inventarisasi barang atau aset SKPD 5 tahun terakhir	Ada		Foto Copy berita acara pelaksanaan inventarisasi	DPP dan PA
		- Buku Inventarisasi		ada		
		- Kartu Invent. Barang		ada		
		- Kartu Invent.Ruang		ada		
19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0.00	Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang tidak digunakan SKPD	DPP dan PA
		Total aset yang dikuasai SKPD	Rp	447,058,729.68	Daetar rincian yang menunjukkan total aset yang dikasai SKPD	DPP dan PA

NO.IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN DATA	ELEMEN DATA DALAM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
20	Jumlah fasilitas/prasarana Informasi	Jumlah fasilitas/prasarana Informasi	Buah			
	1. Papan pengum.	Papan pengum.	ada	1 Buah	Foto bukti Fisik	APBD
	2. Pos Pengaduan	Pos Pengaduan	Tidak	1 Buah	Foto bukti Fisik	APBD
	3. Leaflet	Leaflet	ada	2 Lembar	Foto bukti Fisik	
	4. Mobil Operasional	Mobil Operasional	Ada	2 Unit	Foto bukti Fisik	APBD
	5. Pengumuman Mas media	Pengumuman Mas media	ada	ada	Foto bukti Fisik Koran (Media masa)	
	3. Sepeda Motor	Sepeda Motor	Ada		Foto bukti Fisik	APBD
21	Keberadaan Survey kepuasan Masyarakat	tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak	tidak	-	

Raba-Bima, 22 Januari 2018

Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH

Nip. 19650213 199203 1 011

LAMPIRAN : III

INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD KOTA BIMA TAHUN 2017
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	Ket
14	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	51	Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 3.277 Org	x 100%	53.01%	DEPNAKER DAN BKD
				Jumlah Pekerja Perempuan 6.182 Org			
		52	Angka Melek Huruf Perempuan	Jlh Anak Perempuan Usia > 15 Melek Huruf 18.097 Org	x 100%	100.00%	DIKPORA
				Jlh Anak Perempuan Usia > 15 Tahun 18.097 Org			
		53	Partisipasi angkatan Kerja perempuan	JML Partisipasi Angkatan Kerja perempuan 37.285 Org	x 100 %	61.28%	DEPNAKER
				JML Angkatan Kerja perempuan 60.848 Org			

Raba-Bima, 22 Januari 2018
Kepala Dinas PP – PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH
Nip. 19650213 199203 1 011

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017

NO	RKPD	RENJA	RKA	DPA	DPPA	KET.
	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	1 Penyediaan jasa surat menyurat					
2	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
3	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
4	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan					
5	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor					
6	6 Penyediaan alat tulis kantor					
7	7 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					
8	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan					
9	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
10	10 Penyediaan makanan dan minuman					
11	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
12	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
2	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor					
3	3 Pengadaan mebelair					
4	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
5	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
6	6	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
7	7	7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	
1	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Itihisar realisasi kinerja SKPD	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Itihisar realisasi kinerja SKPD	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Itihisar realisasi kinerja SKPD	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Itihisar realisasi kinerja SKPD	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Itihisar realisasi kinerja SKPD	
2	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran					
3	3 Penyusunan Pelaporan realisasi Anggaran					
4	4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					
5	5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	
6	6 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD					
5	Programkoeserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan					
1	1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan PA	1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan PA	1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan PA	1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan PA	1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan PA	
2	2 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	2 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	2 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	2 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	2 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
1	1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan					
2	2 Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan PZTP2A	2 Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan PZTP2A	2 Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan PZTP2A	2 Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan PZTP2A	2 Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan PZTP2A	
3	3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	
4	4 Evaluasi pelaksanaan PUG					
5	5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak					
6	6 Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	6 Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	6 Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	6 Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	6 Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	
7	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan					
1	1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak Perempuan dan Anak di daerah	1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak Perempuan dan Anak di daerah	1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak Perempuan dan Anak di daerah	1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak Perempuan dan Anak di daerah	1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak Perempuan dan Anak di daerah	
2	2 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	2 Pelatihan bagi pelatih TOT SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	2 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	2 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	2 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	
3	3 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	3 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	3 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	3 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	3 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	
4	4 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	4 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	4 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	4 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	4 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	
5	5 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah sakit Sayang Ibu (RSSI)	5 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	5 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah sakit Sayang Ibu (RSSI)	5 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah sakit Sayang Ibu (RSSI)	5 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah sakit Sayang Ibu (RSSI)	
		6 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah sakit Sayang Ibu (RSSI)				
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	
1	1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan					

Raba-Bima, 22 Januari 2018
Kepala Dinas PP – PA

Catatan : Tanda Warna Kuning adalah Program

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH
Nip. 19650213 199203 1 011